

Judul : Program ekstrakurikuler korps Kadet menuai polemik di masyarakat
Tanggal : Kamis, 24 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Program Ekstrakurikuler Korps Kadet Menuai Polemik Di Masyarakat

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi meluncurkan program Ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI).

Peluncuran program ini digelar di SMKN 26, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (23/9). Saat diluncurkan, hadir perwakilan dari 26 sekolah tingkat SMA, SMK, MA, dan sederajat.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengatakan,

kegiatan tersebut lebih menekankan pada pembinaan kesadaran bela negara dan tidak berkaitan dengan militerisme di sekolah.

"KKRI ini sama sekali tidak benar kalau ada semacam kesan militerisme di sekolah," kata Atip.

Kalaupun ada keterlibatan perwira dalam kegiatan KKRI di sekolah, hal tersebut hanya ditujukan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada siswa.

"Sharing bagian dari pengalaman, sharing ilmu pengetahuan, karena para perwira adalah mereka yang berdiri di garis depan dalam

membela negara ini," ujarnya.

Baru diluncurkan, program KKRI mendapatkan berbagai polemik di masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri atas Imparsial, Kontra5, YLBHI, Amnesty International Indonesia, HRWG, WALHI, Centra Initiative, Raksha Initiatives, IRC, ICW, LBH Jakarta, SETARA Institute, LBH Pers, DeJure, LBH Masyarakat, ALDP, Public Virtue, ICIR, ELSAM, PBHI, AJI Jakarta, LBH APIK, KPI, LBH Medan, AJI Indonesia, dan Yayasan Cahaya Guru (YCG), secara tegas menolak program tersebut.

Menurut Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 136 Tahun 2026 yang menjadi dasar pembinaan kesadaran bela negara melalui ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) di jenjang pendidikan menengah mengandung permasalahan konstitusional.

Hal ini dikarenakan pelaksanaannya melibatkan Kementerian Pertahanan dan TNI. Koalisi menilai kebijakan ini membuka ruang lebih luas bagi institusi dan kultur militer untuk

memasuki pendidikan sipil.

Pandangan berbeda datang dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono. Ia justru mendukung penuh program ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI).

"Saya mendukung penguatan kesadaran bela negara melalui pendidikan, termasuk melalui KKRI," dukungannya.

Untuk mengetahui lebih jauh pendapat dan pandangan Dave Laksono serta Ardi Manto Adiputra terkait program Ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI), berikut wawancaranya.

ARDI MANTO ADIPUTRA, Direktur Imparsial

Kami Mendesak Presiden Batalkan Program KKRI



Pemerintah secara resmi meluncurkan Ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI). Apa respons dan tanggapan Anda?

Kami mendesak Presiden dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membatalkan pelaksanaan ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia di sekolah-sekolah serta mencabut Kepmendikdasmen Nomor 136 Tahun 2026.

Kenapa Anda menolak?

Sekolah merupakan institusi sipil yang memiliki mandat untuk mengembangkan pengetahuan, kebebasan berpikir, nalar kritis, kemampuan berdialog, serta penghormatan terhadap HAM.

Sementara itu, organisasi militer bekerja dengan struktur komando

dan kepatuhan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pertahanan. Memasukkan militer ke ranah pendidikan sipil dapat mengaburkan batas antara fungsi pendidikan dan fungsi pertahanan.

Bukankah bersifat sukarela?

Pernyataan bahwa KKRI bersifat sukarela tidak menyelesaikan persoalan pokok, yaitu keterlibatan Kemhan dan TNI dalam pembentukan karakter peserta didik di sekolah sipil. Sekolah seharusnya mengembangkan pengetahuan, kebebasan berpikir, nalar kritis, dialog, dan penghormatan terhadap HAM, sedangkan organisasi militer bekerja melalui struktur komando dan kepatuhan untuk menjalankan fungsi pertahanan. Pencampuran keduanya berisiko

mengaburkan batas antara pendidikan dan pertahanan.

Program ini juga melibatkan Kemhan. Apa pendapat Anda?

Kementerian Pertahanan untuk menghentikan perluasan program KKRI ke lingkungan pendidikan sipil dan seluruh kegiatan yang melibatkan personel dan struktur TNI di sekolah. Panglima TNI untuk menghentikan keterlibatan institusional dalam kegiatan pendidikan siswa di sekolah, termasuk kegiatan KKRI.

Lalu, apa harapan Anda?

Kewajiban bela negara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip demokrasi, HAM, perlindungan anak, dan tujuan pendidikan nasional. ■ **REN**

DAVE LAKSONO, Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Program Ini Langkah Positif Bentuk Karakter



Bagaimana pandangan Anda terhadap program Ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI)?

Menurut saya, program pembinaan kesadaran bela negara melalui ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI merupakan langkah yang positif untuk membentuk karakter generasi muda.

Nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, cinta tanah air, dan semangat kebersamaan sangat penting untuk dipupuk sejak dini bagi generasi muda.

Banyak yang mengkritik program ini karena melibatkan TNI dan Kemhan. Apa pendapat Anda?

Keterlibatan Kementerian Pertahanan dan TNI dalam program ini juga merupakan bentuk sinergi yang baik antara

sektor pertahanan dan dunia pendidikan.

Bisa Anda jelaskan?

TNI memiliki pengalaman dalam pembinaan kedisiplinan, kepemimpinan, kebersamaan, serta wawasan kebangsaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi peserta didik.

Selama dilaksanakannya secara edukatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya melihat keterlibatan tersebut sebagai bagian dari upaya bersama untuk membangun generasi muda yang memiliki kesadaran bela negara.

Menurut Anda, tidak ada masalah dengan sinergi pendidikan dengan Kemhan dan TNI?

Yang penting adalah bagaimana sinergi ini terus diperkuat dengan koordinasi yang baik antara sekolah,

Pemerintah, Kemhan, TNI, orang tua, dan seluruh pihak terkait.

Dengan pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi, program seperti KKRI dapat menjadi ruang pembelajaran yang positif bagi peserta didik, sekaligus memperkuat pemahaman mereka mengenai tanggung jawab sebagai warga negara.

Prinsipnya Anda mendukung, ya?

Saya mendukung penguatan kesadaran bela negara melalui pendidikan, termasuk melalui KKRI. Harapannya, program ini dapat terus dikembangkan secara terukur dan berkelanjutan, sehingga nilai-nilai bela negara tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi tumbuh menjadi karakter dan sikap nyata generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. ■ **REN**